



# Implementasi Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah: Analisis Tata Kelola, Akuntabilitas, dan Koordinasi Aktor

Rahmad Nasir<sup>1</sup>, Boli Tonda Baso<sup>2</sup>, Abdullah R.S<sup>3</sup>, Rizki Amrillah<sup>4</sup>, Rizal Pasoma Plaikari<sup>5</sup>

<sup>1,3,5</sup>STKIP Muhammadiyah Kalabahi, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta, Indonesia

E-mail: [rahmad@stkipmuhammadiyahkalabahi.id](mailto:rahmad@stkipmuhammadiyahkalabahi.id), [bolitonda@staf.undana.ac.id](mailto:bolitonda@staf.undana.ac.id), [rahman2001ugm@gmail.com](mailto:rahman2001ugm@gmail.com), [rizkiamrillah@uhamka.ac.id](mailto:rizkiamrillah@uhamka.ac.id), [rizal.pasoma.plaikari@gmail.com](mailto:rizal.pasoma.plaikari@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2025-12-08 Revised: 2026-01-15 Published: 2026-02-15	This study aims to analyze the implementation procedures of MBG at UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi, Alor Regency, as part of the evaluation of policy implementation at the school level. The study used a qualitative methods with data collection techniques through observation and interviews with the school principal and internal school MBG management officers. Observation Data were analyzed using percentages and categorized based on interpretation guidelines. The results show that MBG implementation procedure is in the good category with an overall score of 74.26%. In detail, food reception scored 88.86% (good), food distribution 66.6% (fairly good), organoleptic testing 66.6% (fairly good), and meal consumption implementation 72.45% (good). These findings confirm that the success of MBG at the school level is strongly influenced by leadership, teamwork, and compliance with procedures as a form of Public Service Accountability. Nevertheless, there are still weaknesses in the aspects of supervision administration, distribution order, and assistance in the implementation of meals that have the potential to reduce the effectiveness of implementation and public trust in the program. This study recommends strengthening the documentation of organoleptic testing, providing class transit areas, adjusting meal times according to guidelines and increasing cross-actor supervision to ensure the quality and legitimacy of the MBG policy at the local level.
<b>Keywords:</b> <i>Free Nutritious Meal Program;</i> <i>Policy Implementation;</i> <i>Public Governance;</i> <i>Accountability;</i> <i>Schools;</i> <i>Actor Coordination.</i>	

Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2025-12-08 Direvisi: 2026-01-15 Dipublikasi: 2026-02-15	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pelaksanaan MBG di UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, sebagai bagian dari evaluasi implementasi kebijakan pada level sekolah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara terhadap kepala sekolah serta petugas pengelola MBG internal sekolah. Data observasi dianalisis menggunakan persentase dan dikategorikan berdasarkan pedoman interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan MBG berada pada kategori baik dengan nilai umum sebesar 74,26%. Secara rinci, penerimaan makanan memperoleh nilai 88,86% (baik), distribusi makanan 66,6% (cukup baik), uji organoleptik 66,6% (cukup baik), dan pelaksanaan makan 72,45% (baik). Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan MBG di tingkat sekolah sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan, kerja sama tim, serta kepatuhan terhadap prosedur sebagai bentuk akuntabilitas layanan publik. Meski demikian, masih terdapat kelemahan pada aspek administrasi pengawasan, ketertiban distribusi, dan pendampingan pelaksanaan makan yang berpotensi menurunkan efektivitas implementasi serta kepercayaan publik terhadap program. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pencatatan uji organoleptik, pengadaan tempat transit kelas, penyesuaian waktu makan sesuai pedoman, serta peningkatan pengawasan lintas aktor untuk memastikan kualitas dan legitimasi kebijakan MBG di tingkat lokal.
<b>Kata kunci:</b> <i>Program Makan Bergizi Gratis;</i> <i>Implementasi Kebijakan;</i> <i>Tata Kelola Publik;</i> <i>Akuntabilitas;</i> <i>Sekolah;</i> <i>Koordinasi Aktor.</i>	

## I. PENDAHULUAN

Mebra & Mauleny (2025) menjelaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program prioritas dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang memerlukan perhatian dalam aspek pendanaan dan implementasi. Awalnya program ini dianggarkan sebesar Rp 71 triliun dengan target

penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang pada akhir tahun 2025. Namun, Presiden menghendaki percepatan pencapaian target menjadi September 2025, yang berdampak pada penambahan anggaran sebesar Rp100 triliun sehingga total anggaran dibutuhkan mencapai Rp 171 triliun. Program MBG kemudian diperkuat secara operasional melalui Surat Keputusan

Deputi Bidang Penyaluran BGN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk teknis Program MBG yang hingga saat ini sudah mulai beroperasi di seluruh Propinsi di Indoensia termasuk di Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Alor.

Kiftiyah et al (2025) dalam satu penelitian merekomendasikan pemerintah perlu memprioritaskan sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T dan pulau-pulau kecil lainnya hal tersebut berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran karena dalam waktu yang sangat singkat tidak dimungkinkan melaksanakan program MBG secara merata ke seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, pemerintah perlu melibatkan UMKM di lingkungan sekolah sebagai partner dalam pelaksanaan MBG. Sehingga masyarakat di lingkungan sekolah dapat merasakan manfaat atas pelaksanaan program MBG ini. Hal ini karena program ini dianggap memiliki manfaat bagi para siswa sebagaimana riset yang ditunjukkan oleh Zaenudin (2025) bahwa program MBG memberikan dampak positif pada kesehatan fisik siswa, ditunjukkan dengan peningkatan energi, daya tahan tubuh, dan penurunan frekuensi sakit. Selain itu, konsentrasi belajar siswa juga meningkat, terlihat dari tingginya skor fokus, daya tangkap materi, dan penurunan rasa kantuk saat pembelajaran.

Pemangku kepentingan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di antaranya adalah Kemendikdasmen, Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan dan Pukesmas, dan satuan Pendidikan. Khusus untuk satuan Pendidikan memiliki peran dan tanggung jawab seperti: (1) Melakukan berbagai persiapan sebelum pelaksanaan program MBG, yang meliputi persiapan sarana prasarana, persiapan pelaksanaan, dan persiapan sumber daya manusia/SDM; (2) Melaksanakan MBG di satuan pendidikan sesuai dengan pedoman; dan (3) Melakukan monitoring dan evaluasi. Sementara Petugas Pelaksana Makan Bergizi Gratis di lingkungan Satuan Pendidikan di antaranya adalah kepala sekolah, Petugas Penerima dan Distribusi (minimal 1 orang, ditunjuk oleh Kepala Sekolah), dan Wali Kelas/Guru Pendamping. (Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdasmen RI, 2024).

Laporan Askar et al (2025) dalam temuan utama riset mereka yakni separuh masyarakat Indonesia rentan pangan, 92% Responden yang memilih Prabowo-Gibran dalam Pemilu 2024 karena program makan bergizi gratis, 82% MBG

harus bersumber dari anggaran pemerintah, 46% Responden khawatir atas masalah inefisiensi dalam penyaluran MBG, 4 dari 10 responden khawatir MBG rentan dibajak korupsi, 59% responden tidak setuju bahan makanan impor, 79% menolak pembiayaan dari pinjaman luar negeri, 53% setuju dikelola bersama berbagai pihak, 69% mendukung partisipasi komunitas. Selain masalah makro di atas, selama ini banyak kritikan terhadap program MBG dialamatkan pada kualitas menu makanan, kasus makanan basi dan keracunan di beberapa wilayah, rekrutmen SDM, sorotan terhadap anggaran yang besar dan kritikan lainnya. Namun jarang diperhatikan bagaimana prosedur pelaksanaan di level sekolah sehingga menjadi penting kiranya dilakukan riset tentang prosedur pelaksanaan makan di sekolah sebagai bagian dari upaya untuk mengontrol berbagai sisi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di satuan Pendidikan. Termasuk belum ada riset di Kabupaten Alor terkait prosedur MBG di sekolah sehingga menjadi alasan kuat riset ini penting untuk dilakukan. Sebagaimana disinyalir riset Widyasari et al (2025) tentang Evaluasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar: Implikasi Terhadap Kesehatan Anak dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal yang menemukan MBG meningkatkan kehadiran siswa, kondisi kesehatan, dan menggerakkan ekonomi lokal. Namun, tantangan seperti distribusi yang timpang, kualitas menu, dan lemahnya regulasi masih menjadi hambatan. Distribusi yang timpang bisa dimaknai distribusi dari dapur SPPG ke sekolah serta distribusi makanan dari tempat transit utama, ke tempat transit kelas dan selanjutnya distribusi ke kelas untuk proses makan bersama. Kasus terakhir sebagaimana yang diberitakan Koran Tempo tanggal 12 Desember 2025 yakni mobil MBG menabrak siswa di SDN Kalibiru yang harus juga diantisipasi pihak sekolah maupun yayasan yang mengurus program MBG ini. (<https://www.tempo.co/politik/sederet-fakta-insiden-mobil-mbg-tabrak-siswa-sdn-kalibaru-2098169>)

UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi dipilih sebagai salah satu dari sepuluh sekolah pertama yang mendapatkan program MBG di Kabupaten Alor, selain itu sebagai sekolah papan atas yang letaknya di jantung kota Kalabahi bisa menjadi *role model* bagi pelaksanaan program MBG di sekolah. Untuk itulah penting untuk melihat seberapa baik pengelolaan program MBG terutama terkait prosedur sejak makanan tiba di sekolah, distribusi ke kelas, proses makan hingga

pengembalian tempat makan ke tempat transit utama. Prosedur ini membutuhkan kerja sama tim yang kuat sebagaimana Samwel (2019) menunjukkan pentingnya kerja tim terhadap kinerja karyawan dalam organisasi tidak dapat diremehkan; perusahaan yang memiliki strategi kerja tim akan bertahan lebih lama. Sekolah dipandang sebagai perusahaan, kepala sekolah ada direktur (pemimpin perusahaan), dan petugas internal MBG di sekolah dianalogikan sebagai karyawan. Kekompakan tim juga sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan sekolah dan kepemimpinan tim yang telah ditugaskan.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yakni menggunakan observasi dan wawancara. Penelitian ini dilaksanakan di UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi dengan sumber datanya adalah aktivitas pelaksanaan MBG di SMP Negeri 1 Kalabahi, Kepala Sekolah dan Petugas Pengelola MBG dari internal sekolah.

Untuk menganalisis data observasi digunakan rumus persentasi oleh Arikunto (2010) yakni:

$$P = \frac{NS}{NH} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

P : Persentase

NS : Nilai skor

NH : Nilai harapan

100% : Nilai konstanta

Untuk memberikan kategori atas nilai yang diperoleh digunakan pedoman interpretasi yaitu

**Tabel 1.** Kategori Penilaian

No	Persentasi (%)	Penafsiran
1	76-100	Baik
2	56-75	Cukup baik
3	41-55	Kurang baik
4	0-40	Tidak baik

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Hasil observasi 3 observer baik dari kalangan internal dan eksternal sekolah disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.** Rekapitulasi Hasil Observasi Prosedur pelaksanaan Program MBG di sekolah

No	Observer	Penilaian Variabel (%)				Total Perhitungan semua pertanyaan (%)
		A (Penerimaan Makanan)	B (Distribusi Makanan)	C (Uji Organoleptik)	D (Pelaksanaan Makan)	
1	RN	83,3	66,6	66,6	69,6	71,4
2	RPP	83,3	66,6	66,6	60,86	65,7
3	MM	100	66,6	66,6	86,9	85,7
Total		266,6	199,8	199,8	217,36	222,8
Rata-Rata		88,86	66,6	66,6	72,45	74,26

### B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dibahas sebagai berikut.

#### 1. Penerimaan Makanan

Hasil observasi terkait penerimaan makanan dari petugas SPPG ke petugas di sekolah menunjukkan angka 88,86% yang dikategorikan baik.

Penerimaan makanan tidak diperhitungkan jumlah khusus (%) untuk makanan bagi siswa yang alergi atau pantangan makanan tertentu sehingga tidak terlihat ada form pengisian untuk itu, meski demikian ada klarifikasi dari petugas internal MBG sekolah bahwa semua siswa disini tidak ada yang memiliki alergi atau pantangan makan tertentu. Kendatipun jika ada anak yang tidak mau menyantap makanan karena kondisi tertentu pada hari itu biasanya diberikan kepada teman lainnya untuk disantap sehingga tidak ada makanan yang terbuang sia-sia (*mubazir*) atau dikembalikan secara utuh. Sementara dari pihak SPPG petugas memiliki form isian untuk data MBG pada hari itu.

#### 2. Distribusi Makanan

Hasil observasi mengenai distribusi makanan dari tempat transit makanan utama ke tempat transit kelas hingga ke kelas menunjukkan angka 66,6% atau dikatakan cukup baik.



**Gambar 1.** Perwakilan peserta didik mengambil makanan di tempat transit

Observasi menunjukkan di UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi belum disediakan tempat transit makanan di kelas sehingga makanan dari tempat transit utama langsung diantar ke dalam kelas untuk kegiatan santap siang bersama. Meskipun tempat transit di kelas hanya berupa

pilihan (*option*) atau bukan wajib/keharusan namun jika memungkinkan bisa difikirkan untuk diadakan.

### 3. Uji Organoleptik

Pengamatan tentang uji organoleptik makanan sebelum diberikan kepada para siswa menunjukkan angka 66,6% atau dikatakan cukup baik.

Uji Organoleptik yang dilakukan meskipun dilakukan oleh kepala sekolah melalui sampel 1 porsi makanan yang dibawa ke ruang kepala sekolah, selain itu juga dilakukan oleh guru yang bertugas sebagai piket harian. Kendati begitu, tidak ditemukan ada pengisian form uji Organoleptik sebagaimana prosedur dalam pedoman MBG di sekolah. Makanan hanya akan dibagikan ketika petugas pengetes organoleptik menyatakan makanan aman untuk dikonsumsi. Dari definisi yang dikemukakan oleh Ayustaningwarno, Rustanti, Afifah & Anjani (2020) bahwa Pengujian organoleptik disebut penilaian indera atau penilaian sensorik merupakan suatu cara penilaian dengan memanfaatkan panca indera manusia untuk mengamati tekstur, warna, bentuk, aroma, rasa suatu produk makanan atau minuman. Konsep uji ini sudah dijalankan dengan cukup baik namun tidak diikuti dengan penguatan administrasi (pengisian form) sebagai suatu laporan resmi kepada pihak terkait. Di satu sisi, sangat beresiko bagi petugas uji organoleptik jika makanan tersebut tidak aman misalnya basi dan mengandung racun serta tidak layak konsumsi. Jika terjadi keracunan pada petugas yang umumnya adalah guru maka siapa yang akan bertanggung jawab untuk mencari solusinya. Hal ini termasuk dikeluhkan para guru dan pihak sekolah pada umumnya di percakapan media sosial sehingga harus diperhatikan dengan serius.



**Gambar 3.** Petugas melakukan uji organoleptik sebelum makanan dibagikan ke kelas

### 4. Pelaksanaan Makan

Hasil pengamatan terkait pelaksanaan makan di kelas hingga pengembalian tempat makan ke area transit makanan menunjukkan angka 72,45% yang berkategori baik.



**Gambar 4.** Makan bersama di kelas

Pelaksanaan makan di kelas umumnya tidak didampingi oleh wali kelas/guru pendamping sehingga instruksi persiapan alat makan, berdoa, edukasi etika dan kebersihan makan, motivasi menghabiskan makanan umumnya tidak terjadi. Hal ini sebagaimana dalam pedoman MBG di sekolah kemdikdasmen (2024) bahwa pelaksana tugas Wali Kelas/Guru Pendamping memiliki peran dan tanggung jawab terhadap persiapan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan MBG di kelas masing-masing. Wali Kelas/Guru Pendamping juga harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) penjamah makanan (minimum masker dan sarung tangan). Meski demikian, petugas MBG sekolah dalam klarifikasinya bahwa hal itu tidak diberikan setiap hari melainkan pada momen-momen tertentu misalnya pada awal-awal program MBG masuk sekolah, saat pelaksanaan upacara bendera, serta melalui pengeras suara di meja piket. Anak-anak dianggap sudah cukup mandiri untuk melakukan semua itu tanpa harus didikte setiap hari.



**Gambar 2.** Peserta didik mencuci tangan sebelum dan sesudah makan di tempat cuci tangan yang terletak di depan kelas

## 5. Pengamatan Umum

Hasil pengamatan secara keseluruhan menunjukkan angka 74,26% atau dikatakan baik. Angka ini cukup beralasan karena secara substansi, prosedural sebagaimana dalam pedoman MBG di sekolah sudah dijalankan, namun demikian masih ada beberapa celah sekitar 25,74% yang perlu diperbaiki seperti belum adanya tempat transit makanan di kelas, ketidaksesuaian jadwal makan sebagaimana pedoman (11.00 - 13.00 WITA), makan bersama dijadwalkan memakai jam istirahat, tidak ada isian form uji organoleptik serta isian form makanan khusus untuk siswa dengan kategori makanan khusus serta pendampingan makan oleh wali kelas/guru pendamping tidak begitu maksimal karena banyak kelas proses makan bersama tanpa didampingi guru kelas/pendamping.

Pengelolaan yang dianggap baik ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti et al (2025) tentang "Sistem Distribusi MBG di SMP Falatehan, Contoh Praktik Pembelajaran Sistem Kolaborasi yang Efektif di Sekolah" yang menunjukkan bahwa sistem distribusi MBG di SMP Falatehan berjalan tertib, melibatkan seluruh unsur sekolah, dan memiliki alur yang jelas dari pihak penyedia, guru, hingga siswa. Pelibatan siswa dalam proses distribusi secara aktif membentuk nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, keterampilan organisasi, serta budaya gotong royong. Proses ini mencerminkan prinsip-prinsip teori sistem, di mana input, proses, dan output bekerja secara terpadu dalam membentuk sistem pendidikan yang bukan hanya efisien secara teknis, tetapi juga mendidik secara sistemik. Sistem distribusi MBG di SMP Falatehan dapat menjadi model praktik yang layak direplikasi di sekolah lain.

Petugas Pelaksana Makan Bergizi Gratis di UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi sudah sangat lengkap dikarenakan ada kepala sekolah yang aktif memantau (*monitoring*) pelaksanaan MBG termasuk telah menunjuk petugas penerima dan distribusi serta guru pendamping/wali kelas. UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi melampaui standar dalam hal penunjukkan petugas Pelaksana Makan Bergizi Gratis karena melibatkan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan petugas piket harian, hal ini karena jumlah siswa

yang sanga banyak mencapai 848 siswa yang terdistribusi di banyak kelas dari kelas VII, VIII dan IX. Efektivitas pelaksanaan prosedur MBG di UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi juga sangat bergantung pada *teamwork* dan *leadership* dari kepala sekolah maupun tim yang ditunjuk dan diberi kewenangan resmi untuk melaksanakan tugasnya. Kepemimpinan penting sebagaimana Blanchard (2010) menjelaskan Kepemimpinan sebagai kemampuan mempengaruhi orang lain dengan kekuatan dan potensi demi pencapaian tujuan dan berdampak pada kebaikan yang lebih besar.

## IV. SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Prosedur pelaksanaan Program MBG di sekolah dengan standar Pedoman Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah yang terjadi di UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi, Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur yakni pada kode A (Penerimaan makanan) sebesar 88,86% yang terkategori baik, kode B (Distribusi makanan) sebesar 66,6% dengan kategori cukup, kode C (uji organoleptik) sebesar 66,6% dengan kategori cukup baik dan kode D (pelaksanaan makan) sebesar 72,45% berkategori baik. Secara umum, Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di UPTD SMP Negeri 1 Kalabahi secara umum berada pada kategori baik (74,26%), yang menunjukkan kemampuan sekolah sebagai unit pelayanan publik dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke praktik lokal. Secara politik, capaian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh keputusan pusat, tetapi sangat bergantung pada tata kelola implementasi, kepemimpinan sekolah, serta koordinasi aktor. Namun, masih terdapat celah pada aspek distribusi dan administrasi pengawasan (uji organoleptik dan pendampingan kelas) yang bila tidak diperbaiki berpotensi melemahkan akuntabilitas program dan menurunkan kepercayaan publik.

### B. Saran

Meskipun pelaksanaan makan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah baik, namun beberapa hal perlu diperhatikan.

1. Perkuat akuntabilitas melalui pengisian form uji organoleptik dan pencatatan prosedur sebagai bukti tata kelola layanan publik.
2. Benahi sistem distribusi dengan menyediakan tempat transit kelas dan pembagian yang tertib untuk mengurangi risiko ketimpangan layanan dan insiden logistik.
3. Tetapkan waktu makan khusus sesuai pedoman agar MBG tidak mengganggu proses belajar dan memperkuat efektivitas kebijakan.
4. Perkuat pengawasan lintas aktor (sekolah-dinas-puskesmas-SPPG) untuk memastikan standar mutu, keamanan pangan, dan legitimasi program di tingkat lokal.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. (2010). *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Askar, M.W., Muhammad, G.D., Fikri, B., Darmawan, J. (2025). Mitigasi Resiko Program Makan Bergizi Gratis. Center of Economic and Law Studies (Celios) Jakarta. Hal.2
- Ayustaningwarno, F., Rustanti, N., Afifah, D.N., & Anjani, G. (2020). Teori dan Aplikasi Teknologi Pangan. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Hal.1
- Blanchard, K. (2010). *Leading at a higher level: blanchard on leadership and creating high performing organizations*. Blanchard Management Corporation Publishing as FT Press.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2024). Pedoman Makan Bergizi Gratis (MBG) di satuan pendidikan. 26-30
- Kiftiyah, A., Palestina, F.A., Abshar, F.U., Rofiah, K. (2025). Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Keadilan Sosial dan Dinamika Sosial – Politik. Pancasila: Jurnal Keindoneisaan, Vol. 05, No. 01 (2025) Receipt 15 February 2025. 101-112.
- Mebra, Y.A., & Mauleny, A.T. (2025). Percepatan Prpgram Makan Bergizi Gratis: Tantangan Pendanaan dan Implementasi. tempo.co, 31 Januari 2025. 1-2
- Samwel, J.O. (2019). The Importance of Teamwork on Employees' Performance Evidence From Selected Manufacturing Companie In Lake Zone Regions of Tanzania. International Journal of Economics, Business and Management Research Vol. 3, No. 05; 2019. Hal.11
- Widyasari, Larasati & Alam. (2025). Evaluasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar: Implikasi Terhadap Kesehatan Anak dan Pemberdayaan Ekonomi Lokal. *NNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025*. Page: 1727-1736. E-ISSN2807-4238 and P-ISSN:2807-4246. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Wijayanti, R., Khusniyah, D., Dilia, M.H.H., Fitri, W.A., Suhardi. (2025). Sistem Distribusi MBG di SMP Falatehan Contoh Praktik Pembelajaran Sistem Kolaborasi yang Efektif di Sekolah. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan Volume 4 No 1, Juli-September 2025, pp 1234-1241.
- Zaenudin, D. (2025). Manfaat Program Pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap Kesehatan dan Konsentrasi Belajar Siswa di SMAN1 Pebayuran. Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 9 Nomor 2 Tahun 2025. Halaman 17297-17301.
- <https://www.tempo.co/politik/sederet-fakta-insiden-mobil-mbg-tabrak-siswa-sdn-kalibaru-2098169> akses tanggal 14 Desember 2025.